# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
# Tahun 2023

# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
# Tahun 2023

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pada tahun-tahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 19 Maret 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012

**DAFTAR ISI**


KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah 3
D. Landasan Hukum 5
E. Sistematika 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis 7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

A. Capaian Kinerja Organisasi 32
B. Realisasi Anggaran 62
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 63

BAB IV PENUTUP 66

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatka, bidang statistik dan bidang Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
- Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bi dang Persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .

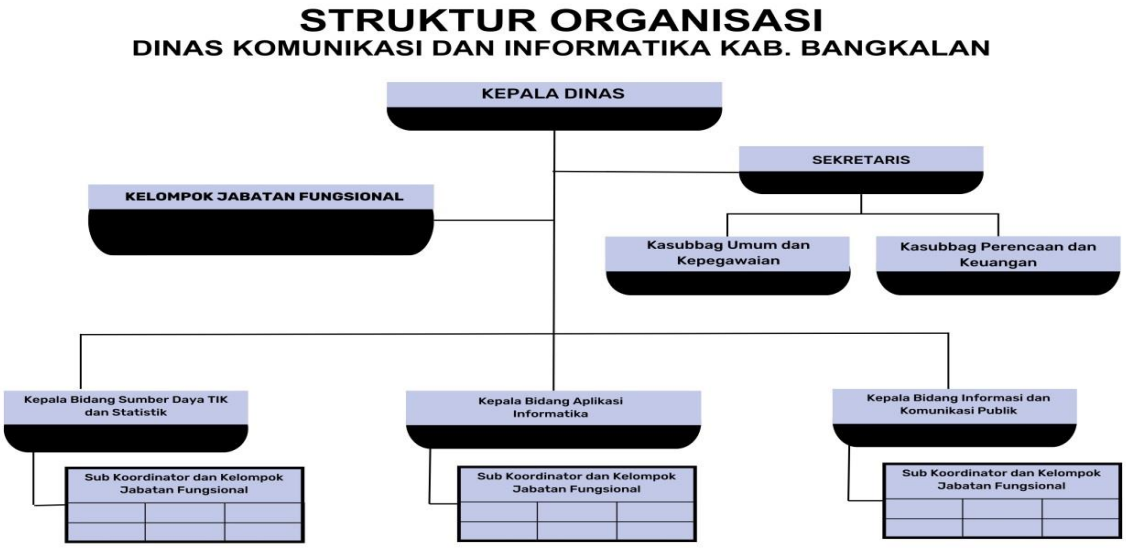


Gambar 1.1 Struktur Organisasi

## C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. SDM aparatur yang ada belum memiliki kepemimpinan (leadership commitment) yang memadahi untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sectoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal;
2. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsive;
3. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multi media, desain grafis, jurnalistik, serta dasar-dasar ilmu komunikasi lainnya.;
4. Regulasi dan peraturan-perudangan yang ada terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum ditindaklanjuti dengan pedomanpedoman teknis seperti standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses bisnis SPBE berbagai macam layanan terhadap pengguna perlu diatur dengan SOP untuk memperjelas proses pelayanan;
5. Kelembagaan TIK yang sudah terbentuk belum sepenuhnya dipahami maksud dan tujuannya, akibatnya kelembagaan yang sedianya untuk mempertegas otoritas dan disposisi tidak berjalan. Hal ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi;

6. Data Center dan Disaster Recovery Center belum memenuhi kapasitas maksimal untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun masyarakat;
7. Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social;
8. Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan menara telekomunikasi;
2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penaatan terhadap peraturan perundangundangan bidang Komunikasi;
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi

## D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 33 Seri E);

**E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 adalah :

| | |
|---|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV | PENUTUP |

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

**1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal

**2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan keagamaan.
2. Menyelenggarakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
3. Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA mengacu pada Misi ke-2, yaitu ***"Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi".***

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| NO | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | 5.1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | 5.2 | Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 0 | 40 | 60 | 80 | 90 |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | 5.3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | 0 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| 6 | Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | 0 | 75 | 77 | 80 | 83 |

*Sumber : Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023*

**4. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | PENJELASAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Terpenuhinya prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah | 1.1 | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | prosentase | infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah | DISKOMINFO Bangkalan |
| 2 | Terpenuhinya prosentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 2.1 | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | | Konten informasi yang dipublikasikan | jumlah konten informasi yang dipublikasikan | DISKOMINFO Bangkalan |
| 3 | Terpenuhinya prosentase jumlah jenis data statistik yang tersedia | 3.1 | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | | Jenis data statistik yang tersedia | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | DISKOMINFO Bangkalan |
| 1 | Meningkatknya pelayanan | 1.1 | Indeks kepuasan | indeks | Operasional | Indeks kepuasan layanan internal | DISKOMINFO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kesekretariatan | | layanan internal kesekretariatan | | pelayanan kesekretariatan | kesekretariatan | Bangkalan |
| 6 | Meningkatknya pelayanan kesekretariatan | 6.1 | Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | prosentase | Operasional kinerja Diskominfo | Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO Bangkalan |
| 5 | | 5.1 | Indeks SPBE | | | | |

*Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023*

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**

**Rencana Kinerja Tahun 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| NO | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | 5.1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | Prosentase | 70 |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | 5.2 | Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | | 100 |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten | 5.3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | | 60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bangkalan | | Efisiensi | | | |
| 6 | Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | indeks | 85 |

*Sumber : Rencana Kerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tahun 2023*

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 2 bulan Januaei tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**
**Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 70 |
| 2 | Terpenuhinya prosentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 100 |
| 3 | Terpenuhinya prosentase jumlah jenis data statistik yang tersedia | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | 60 |
| 4 | Meningkatknya pelayanan kesekretariatan | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | 85 |
| 5 | Meningkatknya pelayanan kesekretariatan | Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | 80 |
| 6 | | Indeks SPBE | 3.5 |

*Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023**

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 70 |
| 2 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi aplikasi TNDE | 70 |
| 1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi keamanan informasi | 70 |
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 100 |
| 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan statistik sektoral di lingkup daerah / kabupaten kota | 60 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Perangkat Daerah | evaluasi kinerja perangkat daerah | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | 100 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat | 100 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana | 85 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 80 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana | 0 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 80 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana | 0 |
| 1 | PROGRAM APLIKASI | Prosentase terintegrasinya sub domain dengan | 70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INFORMATIKA | domain resmi pemerintah | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah | 70 |
| 1 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase jumlah berita dipublikasikan | 100 |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Prosentase Jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan | 60 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah | 85 |
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang dihasilkan | 0 |
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | sosialisasi aplikasi integrasi | 0 |
| 1 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Jumlah lisesnsi keamanan website | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kabupaten/Kota | | |
| 1 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi | 0 |
| 1 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara | 0 |
| 2 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio | 0 |
| 3 | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah issue yang berhasil di angkat | 0 |
| 4 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Operasional komisi infromasi | 0 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen serta data statistik sektoral daerah yang tersajikan | 0 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah operator data statistik yang dilatih | 0 |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 4 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun | 0 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang disusun | 0 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun | 0 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA - SKP yang disusun | 0 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 0 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 0 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 0 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | 0 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | teran SKPD | | |
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD | 0 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 0 |
| 3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Tersampaikannya informasi tentang peraturan perundang - undangan tentang cukai rokok kepada masyarakat, KIM, generasi milenial, relawan TIK dan wartawan di kabupaten bangkalan | 0 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 0 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor | 0 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 0 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 0 |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 0 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 0 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat | 0 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik | 0 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa penyediaan pelayanan umum kantor | 0 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 0 |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | direhabilitasi | |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 0 |
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah website resmi yang dikelola | 0 |
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jaringan yang terpasang | 0 |
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan | 0 |
| 3 | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah permohonan data dan infromasi yang ditindak lanjuti | 0 |
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam | Jumlah lisensi aplikasi yang dihasilkan | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat yang dihasilkan | 0 |
| 1 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat keamanan yang dihasilkan | 0 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka - skpd | 1 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa - skpd | 1 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | penyusunan dokumen perubahan dpa - skpd | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtyisar realisasi kinerja skpd | 1 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 63 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik derah pada SKPD | 14 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 |
| 1 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pemerintah daerah | |
| 2 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik | 12 |
| 5 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 12 |
| 4 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 12 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 61 |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS | 61 |
| 1 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi | jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan | 61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | layanan keamanan informasi | |
| 2 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan | 1 |
| 2 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah | 1 |
| 2 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan | 210 |
| 2 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah website resmi yang dikelola | 2 |
| 2 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Julmah sosialisasi yang diadakan | 1 |

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023*

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|---|---|---|
| 1 | Sangat Tinggi | 91 ≤ 100 |
| 2 | Tinggi | 76 ≤ 90 |
| 3 | Sedang | 66 ≤ 75 |
| 4 | Rendah | 51 ≤ 65 |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50 |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Capaian Indikator Kinerja Utama**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023**

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariata | Indeks kepuasan layanan internal | 85 | 85 | 100 | Sangat Tingi | DISKOMINFO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | kesekretariatan | | | | | Bangkalan |
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 70 | 70 | 100 | Sangat Tingi | DISKOMINFO Bangkalan |
| 2 | Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 100 | 100 | 100 | Sangat Tingi | DISKOMINFO Bangkalan |
| 3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | 60 | 60 | 100 | Sangat Tingi | DISKOMINFO Bangkalan |

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian indikator kinerja yaitu 78,31 dengan predikat kinerja sesuai kategori "Tinggi" dengan rincian sebagai berikut :

- Indikator kinerja "Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan" dengan indeks 85. Pengukuran indeks kepuasan internal ini didapat dari hasil survey yang dilakukan dengan responden ASN internal Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelayanan kesekretariatan.

- Indikator kinerja "Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah dengan persentase sebesar 70 %. Hal ini bisa mencapai target dikarenakan SKPD terfasilitasi atas layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra PD.
- Indikator kinerja "Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan " dengan persentase sebesar 100%. Hal ini bisa mencapai target dikarenakan media informasi yang tersedia mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media sosial.
- Indikator kinerja "Prosentase jumlah jenis data statistik yang dihasilkan " dengan persentase sebesar 60%. Hal ini bisa mencapai target dikarenakan adanya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Capaian Kinerja**

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | | | 82.51 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Terselenggaranya penyebarluasa | Persentase jumlah konten | | | 56.22 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n informasi penyelenggaraan pemerintahan | informasi yang dipublikasikan | | | | | | |
| 3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | | | 29 | 60 | 60 | 100 |
| 1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | | | 83.72 | 85 | 85 | 100 |
| 6 | Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 62.07 | 80 | 80 | 100 |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | Indeks SPBE | | | 1.89 | 3.5 | 2.63 | 75.14 |

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

## Tabel 3.4

## Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir 2023 | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4/5*100** |
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | 60 | 60 | 100 |
| 1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | 85 | 85 | 100 |
| 6 | Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas | 80 | 80 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Komunikasi dan Informatika | | | |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | Indeks SPBE | 2.63 | 3.5 | 75.14 |

Uraian penjelasan tabel:

- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja "Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah" sebesar 100%
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja "Persentase jumlah berita dipublikasikan" sebesar 100%.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja "Prosentase jumlah data statistik sectoral yang dihasilkan" sebesar 100%.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja "Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan" sebesar 100%.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja "Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika" sebesar %.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja "Indeks SPBE" sebesar 75.14%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2021 | Standar Nasional | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4/5*100** |
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, | 70 | | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | | | |
| 2 | Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 100 | | 100 |
| 3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | 60 | | 100 |
| 1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | 85 | | 100 |
| 6 | Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | 80 | | 100 |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | Indeks SPBE | 2.63 | | 75.14 |

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada table berikut :

## Tabel 3.6
## Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 70 | 70 | 100 | Program, kegiatan, sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan | Seluruh OPD telah terhubung jaringan intra pemerintah daerah |
| 2 | Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan | Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan | 100 | 100 | 100 | Media informasi yang tersedia mampu menjangkau keseluruhan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social. | Penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media social |
| 3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi | Jumlah jenis data statistik yang tersedia | 60 | 60 | 100 | Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan telah terlaksana | Adanya sistem "open data Bangkalan" yang berisikan data statistik sektoral Kab. Bangkalan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dikarenakan adanya sinergitas antar OPD dalam collecting data | |
| 1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan | Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan | 85 | 85 | 100 | Pengukuran indeks kepuasan internal ini didapat dari hasil survey yang dilakukan dengan responden ASN internal Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelayanan kesekretariatan | Untuk selanjutnya pelayanan internal kesekretariatan akan dipertahankan dan terus ditingkatkan |
| 6 | Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | 80 | 80 | 100 | Program, kegiatan, sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan | Program, kegiatan dan sub kegaiatan tetap sesuai dengan yang ada pada renstra Diskominfo dengan menyesuaikan anggaran yang ada |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | Indeks SPBE | 3.5 | 2.63 | 75.14 | Mengalami peningkatan daripada capaian tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan adanya dari kerjasama yang baik antar OPD untuk | Peningkatan capaian indikator layanan SPBE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | meningkatkan capaian SPBE | |

Uraian penjelasan tabel:

- Capaian Indikator Kinerja "Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah" sebesar 100%.
- Capaian Indikator Kinerja "Persentase jumlah berita dipublikasikan" sebesar 100%.
- Capaian Indikator Kinerja "Prosentase jumlah data statistik sectoral yang dihasilkan" sebesar 100 %.
- Capaian Indikator Kinerja "Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan" sebesar 100%.
- Capaian Indikator Kinerja "Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika" sebesar 100%.
- Capaian Indikator Kinerja "Indeks SPBE" sebesar 75.14%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang /Tidak Menunjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 70 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanan ya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 2 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 70 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi aplikasi TNDE | 100 | Menunjang |
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah | 70 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi keamanan informasi | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan statistik sektoral di lingkup daerah / kabupaten kota | 83.33 | Menunjang |
| 1 | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Persentase tersusunnya perencanaan, pengangg | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Daerah | aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | |
| 2 | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | 100 | Menunjang |
| 3 | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat | 100 | Menunjang |
| 4 | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana | 0 | |
| 5 | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 100 | Menunjang |
| 6 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | terlaksana | | |
| 7 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Menunjang |
| 8 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana | | |
| 1 | | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase jumlah berita dipublikasikan | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | PROGRAM PENYELENGG | Prosentase Jumlah | 83.33 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ARAAN STATISTIK SEKTORAL | data statistik sektoral yang dihasilkan | | |
| 1 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang dihasilkan | | |
| 1 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | sosialisasi aplikasi integrasi | | |
| 1 | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lisesnsi keamanan website | | |
| 1 | | | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah | Jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisa | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Daerah | si | | |
| 1 | | | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara | | |
| 2 | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio | | |
| 3 | | | | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah issue yang berhasil di angkat | | |
| 4 | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Operasional komisi infromasi | | |
| 1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen serta data statistik sektoral daerah yang tersajikan | | |
| 2 | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah operator data statistik yang dilatih | | |
| 3 | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik | Jumlah aparatur yang memaham | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sektoral | i tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik | | |
| 1 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun | | |
| 3 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang disusun | | |
| 4 | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun | | |
| 5 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA - SKP yang disusun | | |
| 6 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Realisasi Kinerja SKPD | ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | | |
| 7 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | | |
| 1 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | |
| 2 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | | |
| 3 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun | | |
| 1 | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | | |
| 3 | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Tersampaikannya informasi tentang peraturan perundang - undangan tentang cukai rokok kepada masyarakat, KIM, generasi milenial, relawan TIK dan wartawan di kabupaten bangkalan | | |
| 1 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | | |
| 2 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor | | |
| 4 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | |
| 5 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | | |
| 6 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | |
| 1 | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | | |
| 2 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | | |
| 1 | | | | Penyediaan Jasa Surat | Jumlah penyediaa | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Menyurat | n jasa surat menyurat | | |
| 2 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik | | |
| 3 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa penyediaan pelayanan umum kantor | | |
| 1 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | | |
| 2 | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | | |
| 3 | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah sarana dan | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | | |
| 1 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah website resmi yang dikelola | | |
| 1 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jaringan yang terpasang | | |
| 1 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan | | |
| 3 | | | | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah permohonan data dan | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | infromasi yang ditindak lanjuti | | |
| 1 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lisensi aplikasi yang dihasilkan | | |
| 1 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat yang dihasilkan | | |
| 1 | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat keamanan yang dihasilkan | | |
| 2 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka - skpd | 100 | Menunjang |
| 3 | | | | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | |
| 4 | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa - skpd | 100 | Menunjang |
| 5 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa - skpd | 100 | Menunjang |
| 6 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtyisar realisasi kinerja skpd | | |
| 7 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 | Menunjang |
| 3 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestera | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | an SKPD | n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | |
| 1 | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik derah pada SKPD | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 | Menunjang |
| 3 | | | | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kantor | Logistik Kantor yang Disediakan | | |
| 4 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 | Menunjang |
| 5 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100 | Menunjang |
| 6 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | |
| 2 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | n | | |
| 1 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 | Menunjang |
| 3 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 | Menunjang |
| 1 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | |
| 3 | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Sarana dan | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | |
| 1 | | | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik | 100 | Menunjang |
| 5 | | | | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 0 | |
| 4 | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | di Daerah | | |
| 1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 0 | |
| 2 | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 32.79 | Menunjang |
| 3 | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS | 0 | |
| 1 | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah website resmi yang dikelola | 100 | Menunjang |
| 2 | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Julmah sosialisasi yang diadakan | 100 | Menunjang |

Uraian penjelasan tabel :

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tinggi. Untuk selanjutnya di tahun tahun yang akan datang Diskominfo selaku lembaga yang mendukung smart governance melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan melakukan strategi dan

kebijakan melalui pengembangan infrastruktur, jalur media informasi dan kualitas data statistic.

B. **Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**

**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1,500,000,000 | 1,496,000,000 | 99.73 |
| 1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 39,570,000 | 39,464,900 | 99.73 |
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1,624,664,000 | 1,610,905,595 | 99.15 |
| 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 1,230,000 | 870,000 | 70.73 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,013,000 | 8,813,000 | 97.78 |
| 2 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100,000,000 | 94,441,000 | 94.44 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,807,048,644 | 4,753,646,524 | 98.89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 30,263,652 | 30,158,250 | 99.65 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,394,891,132 | 1,318,127,680 | 94.5 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 1,600,000,000 | 1,590,441,000 | 99.4 |
| 1 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1,624,664,000 | 1,610,905,595 | 99.15 |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1,230,000 | 870,000 | 70.73 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6,241,216,428 | 6,110,745,454 | 97.91 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 39,570,000 | 39,46,4900 | 99.73 |

## C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

## Tabel 3.9

## Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Esisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % Capaian | |
| 1 | Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah | 70 | 70 | 100 | 1,639,570,000 | 1,629,905,900 | 99.41 | 0.59 |
| 2 | Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan | 100 | 100 | 100 | 1,624,,664,000 | 1,610,905,595 | 99.15 | 0.85 |
| 3 | Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi | 60 | 60 | 100 | 1,230,000 | 870,000 | 70.73 | 29.27 |
| 1 | Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan | 85 | 85 | 100 | 6,241,216,428 | 6,110,745,454 | 97.91 | 2.09 |
| 6 | Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika | 80 | 80 | 100 | 6,241,216,428 | 6,110,745,454 | 97.91 | 2.09 |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan | 3.5 | 2.63 | 75.14 | 3,265,464,000 | 3,254,785,900 | 99.67 | 24.53 |

Uraian penjelasan tabel:

- Capaian Indikator Sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 99.41% sehingga tingkat efisiensi nya sebesar 0.59

- Capaian Indikator Sasaran Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 99.15% sehingga tingkat efisiensi nya sebesar 0.85.
- Capaian Indikator Sasaran Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 70.73% sehingga tingkat efisiensi nya sebesar 29.27.
- Capaian Indikator Sasaran Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 97.91% sehingga tingkat efisiensi nya sebesar 2.09.
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 97.91% sehingga tingkat efisiensi nya sebesar 2.09.
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan dengan persentase capaian kinerja sebesar 75,14% dan persentase capaian anggaran sebesar 99.67% sehingga tingkat efisiensi nya sebesar 24.53.

# BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA menetapkan sebanyak 2 tujuan, 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 “Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan” dengan indikator “Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik” dengan capaian kinerja sebesar 75,14% (Sedang)
- Tujuan 2 “Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika” dengan indikator “Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatik” dengan capaian kinerja sebesar 85 (Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 70% (kategori sedang)

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 60% (kategori rendah)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 85 (kategori tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9,506,680,428 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9,352,426,949 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98.38% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.62%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 19 Maret 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012